

PERUBAHAN RENSTRA 2024-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan taufiq-Nya semata sehingga Dokumen **“Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan”** Tahun 2024-2026 ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis ini akan senantiasa dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Trantibum dan Damkarmat. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan Trantibum dan Damkarmat di Kabupaten Bangkalan

Dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renstra ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak khususnya Tim Penyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Akademisi dan Stakeholder untuk kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, kami Tim Penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Dokumen Perubahan Renstra ini.

**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN**



ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, AP., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19760714 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk Capaian SPM sesuai dengan Tupoksinya)
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD (berdasarkan Capaian Kinerja PD pada Bab II)
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bangkalan

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 5.1 Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi
Pamong Praja

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan ini akan menjadi tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan berdasarkan Hukum sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, kawasan Bromo Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);

15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E);
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 33/E);
18. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 adalah:

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama 3 (tiga) tahun.

b. Tujuan

- 1) Sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
- 2) Sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk Capaian SPM sesuai dengan Tupoksinya); dan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD (berdasarkan Capaian Kinerja PD pada Bab II);
- 3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan tentang Visi dan Misi yang didukung oleh PD serta tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun kedepan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan sasaran untuk kesempurnaan dokumen

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan No. 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

- Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.

- Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b) penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan bidang ketentraman

dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- e) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan No. 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Satuan;
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penindakan; dan
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensial Masyarakat; dan
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan; dan
 - 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) UPT.
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

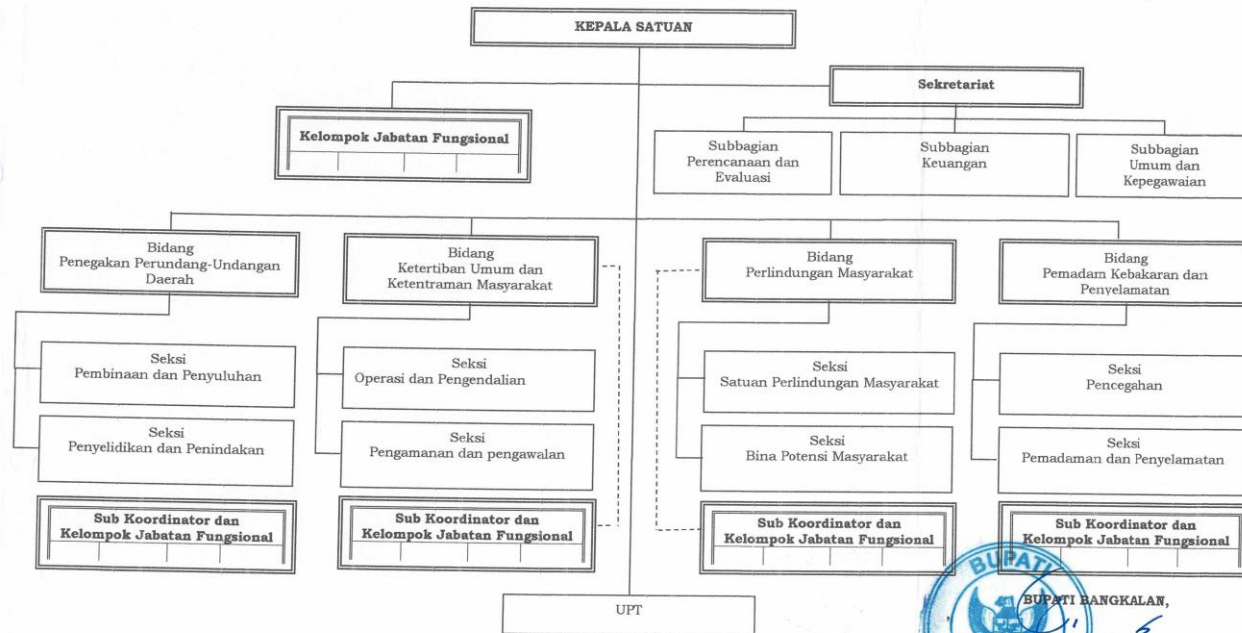
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKALAN

-22-

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR **45**
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKALAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bangkalan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	5
2.	Strata 1 (S-1)	70
3.	Sarjana Muda / D3	-
4.	SLTA / SMK / KPAA	244
5.	SLTP	7
6.	SD	2
Jumlah		328

B. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Perjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	3
2.	SPAMA/ DIKLATPIM III	2
3.	SPAMEN	1
Jumlah		6

C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	1
2.	II	43
3.	III	50
4.	IV	3
Jumlah		97

D. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	10
4.	Fungsional	39
5.	Staf	43
Jumlah		97

E. Dukungan Personil (PNS) Satuan Kerja Perangkat Daerah Per 31 Desember 2024

JUMLAH PERSONIL (PNS/CPNS/THL)							
Jabatan Struktural yang Harus Ada	Jabatan Struktural yang Ada	Non Struktural	Jabatan Fungsional	PNS	PPPK	THL	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8= (1+2+3+4+5+6+7)
21	17		13	57	26	231	328

F. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kendaraan Roda 6 (TRUCK)	3	Truk Patroli, Truk Damkar (2)
2	Kendaraan Roda 4	8	Xtrail, Patroli, Rush, Xenia, Patwal, Ertiga, Avanza

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
3	Kendaraan Roda 3	2	Viar Pemadam Kebakaran
4	Kendaraan Roda 2	10	Benelli (4), Lexi (4), Kirana 2 (Rusak)
5	Handy Talky	32	29 (Baik) 3 (Tidak layak pakai/rusak)
6	Komputer	13	8 (Baik) 5 (Rusak Ringan)
7	Laptop	15	8(Baik) 4(Rusak Ringan) 3(Rusak Berat)
8	AC	15	4(Baik) 11(Rusak Ringan)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran diperoleh data capaian sebagai berikut :

1. Sasaran penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat, dengan indicator persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan menunjukan capaian kinerja 109% yaitu sebanyak 159 pelanggaran dan pengaduan yang dapat diselesaikan.
2. Sasaran peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time, dengan indicator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time menunjukkan capaian kinerja 100% yaitu sebanyak 37 kejadian kebakaran secara respon time.
3. Sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan indicator :

- a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian kinerja 99% dengan nilai 60,3.
- b) Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian kinerja 103% dengan indeks 88,00.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, maka telah ditetapkan standar pencapaian dengan skala sebagaimana tabel berikut :

Standar Pencapaian Kinerja

NO .	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
1.	Sangat Baik	>90
2.	Baik	75,00 – 89,99
3.	Cukup	65,00 – 74,99
4.	Kurang	50,00 – 64,99
5.	Sangat Kurang	0 – 49,99

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dari sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai dengan perubahan rencana strategis 2024- 2026 dapat dirinci lebih lanjut pada tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	98%	109%
Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	64%	100%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan	Nilai SAKIP PD	60,85	60,30	99%

urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	88,00	103%

Sebagaimana Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada sasaran penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian 109% pelanggaran dan pengaduan yang ditangani **(sangat baik)**
2. Pada sasaran peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian 100% **(sangat baik)**
3. Pada sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menunjukkan pencapaian:
 - a) Nilai SAKIP PD yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 99% **(sangat baik)**
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai pada tahun 2024 sebesar 103% **(sangat baik)**

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x patroli dalam sehari			1 kali	1 kali	2 kali	1 kali	1 kali	0,5	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	50%	100%	50%	100%	100%
3	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota	1 org setiap Rw/Dusun			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	100%			85%	85%	90%	95%	95%	100%	85%	90%	95%	95%	118%	100%	100%	100%	100%
5	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		(Jml Satpol PP/Jml Penduduk) x 10.000		3,31	3,21	3,17	2,96	2,96	3,31	3,21	3,17	2,96	2,96	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		Jml Limas/ RW (Dusun)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
7	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		Jml Pos Kamling / Jml Desa/ Kelurahan		3,34	4,88	4,88	4,88	4,89	3,34	4,88	4,88	4,88	4,88	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	110.719.400	113.071.600				109.928.600	112.371.600				99%	99%				2%	2%
1 Pengadaan Mebeleur	-	-				-	-				-	-					
2 Pengadaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi	-	-				-	-				-	-					
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.719.400	-				109.928.600	-				0,99	-				100%	100%
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	113.071.600				0	112.371.600				-	0,99					
5 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	-	-				-	-				-	-					

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		314.406.900	345.209.600				313.715.900	341.389.050				100%	99%			10%	9%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	314.406.900	345.209.600				313.715.900	341.389.050				1,00	0,99			10%	9%
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-				-	-				-	-				
3	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	-	-				-	-				-	-				
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		15.000.000	5.000.000				14.737.175	4.430.750				98%	89%			-67%	-70%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	2.500.000				9.952.575	2.484.400				1,00	0,99			-75%	-75%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	2.500.000				4.784.600	1.946.350				0,96	0,78			-50%	-59%
PROGRAM PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI KINERJA SATUAN UNIT KERJA		3.688.855.650	4.095.731.750				3.533.386.454	3.936.103.755				96%	0,96			11%	11%
1	Penunjang Operasional SKPD	3.688.855.650	4.095.731.750				3.533.386.454	3.936.103.755				0,96	0,96			11%	11%

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		463.290.600	270.849.650			454.112.150	263.899.150				98%	97%			-42%	-42%
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	149.712.000	91.846.550			147.627.000	87.660.550				0,99	0,95			-39%	-41%
2	Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Asongan	313.578.600	179.003.100			306.485.150	176.238.600				0,98	0,98			-43%	-42%
3	PAM PEMILU	-	-			-	-				-	-				
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		947.888.400	280.247.825			929.913.500	274.113.000				98%	95%			-70%	-71%
1	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	177.008.400	37.211.900			167.678.800	34.149.400				0,95	0,92			-79%	-80%
2	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaaan	71.795.000	34.993.550			71.111.200	32.518.550				0,99	0,93			-51%	-54%
3		699.085.000	208.042.375			691.123.500	207.445.050				0,99	1,00			-70%	-70%

	5.540.16 0.950	5.110.11 0.425				5.355.79 3.779	4.932.30 7.305				10	9				- 0	- 0
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023***	2019	2020	2021	2022	2023***	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020

5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			12.591.77 9.627	12.780.74 2.502	11.864.39 8.489			12.283.83 2.072	12.673.39 9.868	11.732.67 3.162			89 %	97 %	99%	-55%	-55%
5.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.051.60 0	30.807.10 0	25.203.00 0			39.051.45 0	30.686.00 0	24.297.50 0			10 0%	10 0%	97%	-43%	-48%
5.01.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			26.503.40 0	5.924.500	6.649.700			26.503.40 0	5.903.000	5.995.000			100 %	100 %	90%	12%	2%
5.01.01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	14.748.10 0	12.520.35 0			-	14.660.00 0	12.459.50 0					100 %	-15%	-15%
5.01.01.2. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.755.000	1.599.100	181.550			4.754.950	1.593.000	-			100 %	100 %	0%	-89%	- 100%
5.01.01.2. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
5.01.01.2. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																	
5.01.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.793.200	8.535.400	1.801.400			7.793.100	8.530.000	1.793.000			100 %	100 %	100 %	-79%	-79%

5.01.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.050.000				4.050.000					100 %		
5.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.803.206 .982	6.372.122 .984	6.186.901 .270		5.735.279 .193	6.308.337 .571	6.073.729 .295			94 %	98 %	99%	-16%	-15%
5.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.768.933. 982	6.358.881. 184	6.176.624. 770		5.701.955. 093	6.295.371. 571	6.063.452. 795			99 %	99 %	98%	-3%	-4%
5.01.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.830.000	6.492.000	4.441.850		3.264.200	6.472.150	4.441.850			85 %	100 %	100 %	-32%	-31%
5.01.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.443.00 0	6.749.800	5.834.650		30.059.90 0	6.493.850	5.834.650			99 %	96 %	100 %	-14%	-10%
5.01.01.2 .03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.735.200	1.611.350			5.491.000	1.611.350				96 %	100 %	-72%	-71%
5.01.01.2. 03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
5.01.01.2. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.735.200	1.611.350			5.491.000	1.611.350				96 %	100 %	-72%	-71%
5.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			176.650.0 00	-	-		150.639.0 00	-	-			99 %			- 100%	- 100%
5.01.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			151.650.0 00				150.639.0 00					99 %			-100%	- 100%
5.01.01.2. 05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			25.000.00 0	-			0								-100%	
5.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.393.3 00	174.337.7 35	83.324.80 1		121.855.9 03	166.491.4 30	77.843.71 6			69 %	97 %	97%	-45%	-56%

5.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor			9.106.500	2.769.650	2.531.900			8.250.000	2.705.500	2.530.800			91 %	98 %	100 %	-9%	-6%
1.05.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					23.730.20 0					22.439.50 0					95%		
1.05.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
5.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.954.9 00	79.380.00 0	9.000.000			40.505.10 0	76.660.00 0	9.000.000			40 %	97 %	100 %	-89%	-88%
5.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.347.900	15.158.43 9	2.578.701			4.653.700	14.851.80 0	2.578.500			50 %	98 %	100 %	-83%	-83%
5.01.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			3.840.000					3.840.000					100 %				
5.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan TamU					2.958.000					2.814.000					95%		
5.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.144.0 00	77.029.64 6	42.526.00 0			64.607.10 3	72.274.13 0	38.480.91 6			65 %	94 %	90%	-45%	-47%
5.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				136.464.9 50					136.464.9 50					10 0%		0%	0%
1.05.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
1.05.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel				26.550.00 0					26.550.00 0				100 %				
1.05.01.2. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				109.914.9 50					109.914.9 50				100 %				
5.01.01.2. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
5.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			6.029.189 .745	5.611.762 .400	5.380.954 .518			5.989.263 .528	5.591.825 .125	5.373.419 .718			94 %	97 %	99%	-3%	-1%

5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			246.513.700	370.854.500	98.995.500			241.257.900	351.075.300	94.698.500			94%	90%	94%	50%	51%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			108.785.500	245.524.750	19.750.000			107.737.600	235.610.800	18.935.500			77%	77%	77%	-90%	-89%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			6.640.000	5.400.000	2.431.000			6.577.600	5.220.000	2.431.000			99%	97%	100%	-55%	-53%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			21.000.500	3.732.000	27.400.000			20.429.500	3.732.000	27.400.000			97%	100%	100%	634%	634%
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			45.273.000	25.565.000	15.444.500			44.735.500	18.156.000	12.534.500			99%	71%	81%	-90%	-89%

1.05.02.2. 01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			36.660.00 0				35.430.00 0					97 %				
1.05.02.2. 01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					500.000					-						
1.05.02.2. 01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada					4.470.000					4.470.000				100 %		
1.05.02.2. 01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			11.344.90 0	86.420.25 0	25.000.00 0		10.337.90 0	84.175.00 0	24.977.50 0			91 %	97 %	100 %	-90%	-89%
1.05.02.2. 01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			16.809.80 0	4.212.500	4.000.000		16.009.80 0	4.181.500	3.950.000			95 %	99 %	99%	-5%	-6%
1.05.02.2 .02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			58.865.40 0	607.353.2 79	2.207.465 .466		57.865.40 0	571.266.5 29	2.099.262 .000			10 0%	98 %	97%	-27%	41%
1.05.02.2. 02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				556.623.7 79	1.707.062. 200			538.803.1 79	1.657.511. 800				97 %	97%	207%	208%
1.05.02.2. 02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan			27.496.00 0	11.899.25 0	2.804.850		27.496.00 0	11.667.10 0	2.592.050			100 %	98 %	92%	-76%	-78%

[illegible]

1.05.03.2. 02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			10.167.700	5.710.500	4.845.150			9.367.700	5.710.500	4.845.150			92 %	100 %	100 %	-15%	-15%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			-	7.938.500					7.938.500					100%		0%	0%
1.05.03.2. 03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah zoonosis				7.938.500					7.938.500					100 %			
1.05.03.2. 03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
1.05.03.2. 03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2.096.314.300	100.000.000	227.810.000			2.081.784.300	92.729.000	219.672.027			82 %	97 %	98%	-34%	-28%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.096.314.300	93.100.000	126.610.000			2.081.784.300	88.129.000	119.408.777			82 %	94 %	95%	19%	18%
1.05.04.2. 01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			10.740.000	24.660.000	57.997.600			10.590.000	23.875.000	57.996.777			99 %	97 %	100 %	135%	143%
1.05.04.2. 01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah			23.600.000	21.000.000	47.250.000			13.800.000	20.055.000	40.950.000			58 %	96 %	87%	125%	104%

1.05.04.2. 05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																	
				15.019.204.227	13.872.599,281	14.407.514.605			14.689.670.872	13.702.119.697	14.154.615.439			90%	97%	97%	-23%	-11%

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Masyarakat Kabupaten Bangkalan. Adapun mitra Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatan :

- a. Jajaran TNI/Polri dalam hal koordinasi dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah;
- b. Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian sebagai Sekretariat DBHCHT Kabupaten Bangkalan;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura sebagai mitra di dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal;
- d. Aparat kewilayahan dan masyarakat dalam hal pemberian dukungan informasi;
- e. Peraturan/perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan PD

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan telah berupaya menyelaraskan program dan kegiatannya. Namun masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan pelayanannya. Beberapa permasalahan pelayanan yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Masih banyak pelanggaran Perda/Perkada yang mengandung sanksi. Pelanggaran Perda/Perkada yang paling banyak ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Respon atas pengaduan masyarakat. Dimana komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum kemudian juga memantau respon dari Satpol PP Kab. Bangkalan. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP Kab. Bangkalan untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
3. Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP jika terjadi bentrokan. Aturan yang ada di Kabupaten Bangkalan hanya pendampingan kelembagaan dan bukan perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana tersebut;

4. Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli. Kendaraan patroli ini, baik mobil maupun motor, dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan dalam penegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Mobil dan motor patroli dibutuhkan dalam pembentukan Patroli Reaksi Cepat sebagai tim khusus dalam merespon cepat pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan trantibum linmas.

3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu perangkat kerja di lingkup Pemerintah Kab. Bangkalan. Mempunyai Tujuan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Penguatan Penegakan Perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat.
2. Peningkatan Penanganan dan penyelamatan kebakaran secara response time.
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan Program Prioritas Daerah Satpol PP Kabupaten Bangkalan diantaranya :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Jawa Timur dan secara nasional

dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur pada Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Rancanagn Renstra Satpol PP ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan dalam bentuk kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan evakuasi korban kebakaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Dari isu-isu strategis di atas ada beberapa isu utama yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Bangkalan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yaitu:

1. Menjamurnya Pedagang kaki lima di tempat terlarang;
2. Pemanfaatan lahan milik Pemkab yang dikelola oleh pihak lain;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana di lapangan serta masih kurang memadai kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar (mobil Patroli sudah berumur, Truk Satpol PP hanya 1);
4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal;
5. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Perda

dan Perkada masih rendah

6. Pelayanan Pemadaman Kebakaran kurang maksimal
7. Masih memiliki satu pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah manajemen kebakaran;
8. Masih belum memiliki beberapa peralatan guna menunjang tugas pemedam kebakaran dan penyelamatan;
9. Belum maksimal dalam pencapaian standar pelayanan minimal khususnya pencapaian response time (15 menit)
10. Belum maksimalnya informasi tentang pentingnya fungsi dan keberadaan Satlinmas Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (P-Renstra PD). Adapun tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah					Sasaran Perangkat Daerah				
Uraian	Indikator	Target			Uraian	Indikator	Target		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	7.95%	8.02%	8.72%	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	Persentase gangguan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	90%	95%	100%
					Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	64%	67%	70%
					Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP PD	60.85	61.25	61.85
						Indeks Kepuasan Masyarakat	85.25	86.00	87.00

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Outcome (Indikator Program)	Output (Indikator Kegiatan)	Output (Indikator Sub Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun											
						2023		2024		2025		2026					
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		Rp 8	9		10	11		12	13		14
	Perse ntase penur unan pelan ggara n terha dap Trant ibum dan Perda /perk ada					4.35	%	Rp 14,407,514,605	7.95	%	Rp 15,690,964,917	8.02	%	Rp 13,625,851,433	8.72	%	Rp 13,625,851,433

		Perse ntase gangg uan keten tram an, ketert iban dan perlin dung an masy araka t yang dapat disele saika n				99	%	Rp 2,315, 306,1 16	90	%	Rp 2,097, 414,9 00	95	%	Rp 845,6 55,65 0	10 0	%	Rp 845,6 55,65 0
			Persen tase penind akan dalam pelang garan trantib um			10 0	%	Rp 2,310, 460,9 66	10 0	%	Rp 1,997, 414,90 0	10 0	%	Rp 665,65 5,650	10 0	%	Rp 665,65 5,650
			Persent ase penang anan pengad uan K3			10 0	%	Rp 98,99 5,500	10 0	%	Rp 1,486, 477,00 0	10 0	%	Rp 511,69 5,650	10 0	%	Rp 511,69 5,650

				(Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)													
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 27,400,000	16	Kasus	Rp 2,500,000	179	Kasus	Rp 150,000,000	179	Kasus	Rp 150,000,000
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	Rp 25,000,000	3	Kasus	Rp 1,500,000	3	Kasus	Rp 1,500,000	3	Kasus	Rp 1,500,000

				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	Rp 15,444,500	1	Dokumen	Rp 850,000	3	Dokumen	Rp 60,000,000	3	Dokumen	Rp 60,000,000
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	Dokumen	Rp 500,000	2	Dokumen	Rp 661,420,000	2	Dokumen	Rp 50,500,000	2	Dokumen	Rp 50,500,000
				Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	20	Orang	Rp 4,000,000	20	Orang	Rp 2,050,000	15	Orang	Rp 2,000,000	15	Orang	Rp 2,000,000

				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	98	Kasus	Rp 19,750,000	3	Dokumen	Rp 815,657,000	4	Dokumen	Rp 240,695,650	4	Dokumen	Rp 240,695,650
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	5	Kasus	Rp 2,431,000	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 2,500,000	1	Dokumen	Rp 2,500,000

					Massa yang Dilakukan Penindakan												
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Lapo ran	Rp 4,470 ,000	1	Lapo ran	Rp 2,500, 000	1	Lapo ran	Rp 4,500, 000	1	Lapo ran	Rp 4,500, 000

				Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup		100	%	Rp 2,207,465,466	100	%	Rp 510,937,900	100	%	Rp 153,960,000	100	%	Rp 153,960,000
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	31	Laporan		Rp 1,707,062,200	25	Laporan	Rp 509,437,900	18	Laporan	Rp 149,460,000	18	Laporan	Rp 149,460,000
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	57	Laporan		Rp 497,598,416	3	Laporan	Rp 1,500,000	3	Laporan	Rp 2,500,000	3	Laporan	Rp 2,500,000

				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	Laporan	Rp 2,804,850	0	Laporan	Rp -	4	Laporan	Rp 2,000,000	4	Laporan	Rp 2,000,000
				Persentase aparatur yang ikut pelatihan	100	%	Rp 4,000,000	100	%	Rp -	100	%	Rp -	100	%	Rp -

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	Rp 4,000,000	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -
			Persentase pelayanan penanggulangan bencana			100	%	Rp 4,845,150	100	%	Rp 100,000,000	100	%	Rp 180,000,000	100	%	Rp 180,000,000
			Persentase jumlah petugas yang aktif			100	%	Rp 4,845,150	100	%	Rp 100,000,000	100	%	Rp 180,000,000	100	%	Rp 180,000,000

				dalam penang anan darurat bencana													
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulan gan Bencana (TRC PB) Kabupaten/K ota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	3 0	Oran g	Rp 4,845 ,150	15 0	Oran g	Rp 100,00 0,000	80	Oran g	Rp 175,00 0,000	80		Rp 175,00 0,000
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/K ota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	0	Oran g		0	Oran g	Rp -	30	Oran g	Rp 5,000, 000	30	Oran g	Rp 5,000, 000

					bencana												
		Perse ntase pelay anan penye lamat an dan evaku asi korba n keba karan secar a respo n time				68	%	Rp 227,8 10,00 0	64	%	Rp 300,00 0,000	67	%	Rp 300,00 0,000	70	%	Rp 300,00 0,000
		Persen tase kejadi an kebak aran yang ditang				10 0	%	Rp 227,8 10,00 0	10 0	%	Rp 300,00 0,000	10 0	%	Rp 300,00 0,000	10 0	%	Rp 300,00 0,000

			ani														
				Persentase Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		91.67	%	Rp 126,610,000	90	%	Rp 139,302,000	88.3	%	Rp 144,720,000	86.67	%	Rp 144,720,000
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	14	Dokumen	Rp 57,997,600	10	Dokumen	Rp 70,263,232	10	Dokumen	Rp 71,031,232	10	Dokumen	Rp 71,031,232	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	34	Laporan	Rp 47,250,000	20	Laporan	Rp 45,200,000	35	Laporan	Rp 33,700,000	35	Laporan	Rp 33,700,000	

					Kabupaten/Kota												
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20	Dokumen	Rp 10,500,000	20	Dokumen	Rp 14,300,000	30	Dokumen	Rp 22,150,000	30	Dokumen	Rp 22,150,000
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam	39	Orang	Rp 7,482,400	8	Unit	Rp 6,520,768	10	Unit	Rp 6,570,768	10	Unit	Rp 6,570,768

					Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran												
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	11	Unit	Rp 3,380,000	30	Orang	Rp 3,018,000	45	Orang	Rp 11,268,000	45	Orang	Rp 11,268,000
				Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	%	Rp 1,200,000	100	%	Rp 1,990,000	100	%	Rp 2,090,000	100	%	Rp 2,090,000

					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	Rp 1,200,000	2	Dokumen	Rp 1,310,000	2	Dokumen	Rp 1,360,000	2	Dokumen	Rp 1,360,000
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 680,000	2	Dokumen	Rp 730,000	2	Dokumen	Rp 730,000

				Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran		100	%	Rp 100,000,000	100	%	Rp 150,000,000	100	%	Rp 150,000,000	100	%	Rp 150,000,000
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		150	Orang	Rp 100,000,000	150	Orang	Rp 150,000,000	200	Orang	Rp 150,000,000	200	Orang	Rp 150,000,000
				Persentase Sarana dan Prasarana Pencari		100	%	Rp -	100	%	Rp 8,708,000	100	%	Rp 3,190,000	100	%	Rp 3,190,000

				an dan Pertolo ngan yang diadaka n													
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak an Manusia/Pen yelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0	Unit	Rp -	8	Unit	Rp 8,708, 000	3	Unit	Rp 3,190, 000	3	Unit	Rp 3,190, 000
		Nilai SAKI P PD				6 0. 3 9	nilai	Rp 11,86 4,398, 489	6 0. 8 5	nilai	Rp 13,293 ,550,0 17	6 1. 2 5	nilai	Rp 12,480 ,195,7 83	6 1. 8 5	nilai	Rp 12,480 ,195,7 83
		Indek s Kepu asan Masy araka				8 5. 1 4	inde ks		8 5. 2 5	inde ks		8 6. 0 0	inde ks		8 7. 0 0	inde ks	

		t															
			Indeks kepuas aan layana n penunj ang urusan pemer intahan daerah			1 0 0	Inde ks	Rp 11,86 4,398, 489	1 0 0	Inde ks	Rp 13,29 3,550, 017	1 0 0	Inde ks	Rp 12,48 0,195, 783	1 0 0	Inde ks	Rp 12,48 0,195, 783
				Persent ase Tersusu nnya Perenca naan, Pengan ggaran, dan Evaluas i Kinerja Perang kat Daerah tersusu n sesuai dengan aturan		10 0	%	Rp 25,20 3,000	10 0	%	Rp 10,026 ,900	10 0	%	Rp 13,899 ,950	10 0	%	Rp 13,899 ,950

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Rp 6,649,700	3	Dokumen	Rp 3,191,550	3	Dokumen	Rp 3,967,350	3	Dokumen	Rp 3,967,350
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 12,520,350	1	Dokumen	Rp 121,550	1	Dokumen	Rp 2,603,050	1	Dokumen	Rp 2,603,050
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 181,550	1	Dokumen	Rp 116,050	1	Dokumen	Rp 1,834,300	1	Dokumen	Rp 1,834,300

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 517,500	1	Dokumen	Rp 675,250	1	Dokumen	Rp 675,250
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 477,000	1	Dokumen	Rp 675,250	1	Dokumen	Rp 675,250
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1	Laporan	Rp 1,801,400	1	Laporan	Rp 3,803,250	1	Laporan	Rp 2,344,750	1	Laporan	Rp 2,344,750

					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lapo ran	Rp 4,050 ,000	6	Lapo ran	Rp 1,800, 000	6	Lapo ran	Rp 1,800, 000	6	Lapo ran	Rp 1,800, 000
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu		10 0	%	Rp 6,186, 901,2 70	10 0	%	Rp 7,806, 428,95 9	10 0	%	Rp 8,578, 171,78 3	10 0	%	Rp 8,578, 171,78 3
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	7 6	Oran g/bulan	Rp 6,176 ,624, 770	1 0 0	Oran g/bulan	Rp 7,803, 238,80 9	1 0 0	Oran g/bulan	Rp 8,572, 321,78 3	1 0 0	Oran g/bulan	Rp 8,572, 321,78 3

					ASN													
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		Rp 4,441,850	1	Laporan	Rp 690,050	1	Laporan	Rp 2,000,000	1	Laporan	Rp 2,000,000
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	18	Laporan		Rp 5,834,650	18	Laporan	Rp 2,500,100	18	Laporan	Rp 3,850,000	18	Laporan	Rp 3,850,000

					mesteran SKPD												
				Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir		100 %	Rp 1,611,350	100 %		Rp 1,430,100	100 %		Rp 3,300,000	100 %		Rp 3,300,000	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 615,050	1	Dokumen	Rp 865,000	1	Dokumen	Rp 865,000	

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	Rp 1,611,350	7	Laporan	Rp 815,050	7	Laporan	Rp 2,435,000	7	Laporan	Rp 2,435,000
				Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian		100	%	Rp -	100	%	Rp 93,355,000	100	%	Rp 75,000,000	100	%	Rp 75,000,000
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket		340	Paket	Rp 93,355,000	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	0	orang	Rp -	0	Orang	Rp -	3	Orang	Rp 75,000,000	9	Orang	Rp 75,000,000

					dan Pelatihan												
				Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi		100 %	Rp 83,324,801	100 %		Rp 32,654,608	100 %		Rp 59,512,250	100 %		Rp 59,512,250	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 2,531,900	4	Paket	797,000	4	Paket	1,000,000	4	Paket	1,000,000	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	Rp 23,730,200	12	Paket	13,705,450	12	Paket	16,795,900	12	Paket	16,795,900	

				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	Paket	Rp -	-	Paket	-	1	Paket	850,000	1	Paket	850,000
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	Rp 9,000,000	8	Paket	5,250,000	8	Paket	9,000,000	8	Paket	9,000,000
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	Rp 2,578,701	12	Paket	2,462,158	12	Paket	3,366,350	12	Paket	3,366,350
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	Laporan	Rp 2,958,000	12	Laporan	2,760,000	12	Laporan	3,500,000	12	Laporan	3,500,000

					Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 0	Lapo ran	Rp 42,52 6,000	6	Lapo ran	7,680, 000	4 0	Lapo ran	25,00 0,000	4 0	Lapo ran	25,00 0,000
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10 0	%	Rp 5,380, 954,5 18	10 0	%	Rp 5,196, 235,80 0	10 0	%	Rp 3,582, 080,00 0	10 0	%	Rp 3,582, 080,00 0
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lapo ran	Rp 1,462 ,950	4	Lapo ran	Rp 905,80 0	4	Lapo ran	Rp 1,000, 000	4	Lapo ran	Rp 1,000, 000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 2	Lapo ran	Rp 53,84 4,068	1 2	Lapo ran	Rp 54,000 ,000	1 2	Lapo ran	Rp 54,000 ,000	1 2	Lapo ran	Rp 54,000 ,000

					yang Disediakan												
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 2	Lapo ran	Rp 5,325 ,647, 500	1 2	Lapo ran	Rp 5,141, 330,00 0	1 2	Lapo ran	Rp 3,527, 080,00 0	1 2	Lapo ran	Rp 3,527, 080,00 0
				Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		10 0	%	Rp 186,4 03,55 0	10 0	%	Rp 153,41 8,650	10 0	%	Rp 168,23 1,800	10 0	%	Rp 168,23 1,800
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	0	Unit	Rp -	1	Unit	22,60 4,400	1	Unit	26,37 1,800	1	Unit	26,37 1,800

					Pajaknya												
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	Rp 174,603,550	19	Unit	125,144,250	19	Unit	135,160,000	19	Unit	135,160,000
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit	Rp 4,470,000	15	Unit	1,200,000	15	Unit	1,200,000	15	Unit	1,200,000
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	Rp 1,450,000	6	Unit	4,470,000	6	Unit	5,500,000	6	Unit	5,500,000

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitas i	1	Unit	Rp 5,880 ,000	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -
--	--	--	--	--	--	---	------	---------------------	---	------	---------	---	------	---------	---	------	---------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan dengan menetapkan program- program prioritas. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan Langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Bangkalan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
3. Optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM).
4. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.
5. Optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

Selanjutnya berkenaan dengan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Bangkalan 3 (tiga) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Membentuk satlinmas tingkat desa dan kecamatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas.

3. Meningkatkan standar mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan trantibum linmas.
4. Meningkatkan standar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar pelayanan minimal.
5. Membentuk Pasukan Tanggap Darurat Bencana (Trenggana) atau Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
6. Meningkatkan pelayanan kebencanaan berupa pemenuhan informasi rawan bencana dan optimalisasi evakuasi bencana kepada masyarakat.
7. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak.
8. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.
9. Meningkatkan sarpras dan kualitas pelayanan SDM.

Secara lebih lengkap dapat dilihat keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Isu Strategis: 1. Menjamurnya pedagang kaki lima ditempat terlarang 2. Pemanfaatan lahan milik Pemkab yang dikelola oleh pihak lain 3. Terbatasnya sarana dan prasarana di lapangan serta masih kurang memadai kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar (mobil Patroli sudah berumur, Truk Satpol PP hanya 1) 4. Penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal 5. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi Perda dan Perkada masih rendah 6. Pelayanan Pemadaman kebakaran kurang maksimal 7. Masih memiliki satu pos untuk melayani 18 kecamatan dalam wilayah 8. Masih belum memiliki beberapa peralatan guna menunjang tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan 9. Belum maksimal dalam pencapaian standar pelayanan minimal khususnya pencapaian response time (15 menit) 10. Belum maksimalnya informasi tentang pentingnya fungsi dan keberadaan Satlinmas Desa Dst (Diisi dengan Isu Strategis Perangkat Daerah)			
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Sasaran : Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup bermasyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat	1. Strategi 1.1. optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Strategi 1.2. optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan Strategi 1.3. optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai mutu pelayanan minimal (SPM)	1. 1.1. Meningkatkan Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat 1.2. membentuk satlinmas tingkat desa dan kecamatan serta penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas 1.3. meningkatkan standar mutu sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan trantibum linmas 1.4. meningkatkan standar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai standar pelayanan minimal 1.5. membentuk Pasukan Tanggap Darurat Bencana (Trenggana) atau Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana 1.6. meningkatkan pelayanan kebencanaan berupa pemenuhan informasi rawan bencana dan optimalisasi evakuasi bencana kepada masyarakat.
	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time	2. Strategi 2.1. optimalissi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	2. 2.1. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak 2.2. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran

			yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3. Strategi 3.1. optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat	3. 3.1. Meningkatkan sarpras dan kualitas pelayanan SDM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil (outcome) yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (supporting).

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 ini

mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Bangkalan yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Progra m/ Kegiata n/ Sub Kegiata n	Indikato r Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcom e)/ Kegiata n (output)/ Sub Kegiata n (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2023)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggu ng jawab	Lokasi		
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Setelah di Mutakhirkan																		
Meningkat kan ketentram an, ketertiban umum dan perlindun gan masyarak at				Persenta se penurun an pelangga ran terhada p Trantib um dan Perda/pe rkada	4,35	%	7,9 5	%	Rp 15.69 0.964 .917	8, 02	%	Rp13 .625. 851.4 33	8, 72	%	Rp13. 625.85 1.433		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BANGK ALAN

	Penguatan penegakan perda trantibnas dengan melakukan edukasi dan pengendalian masyarakat			Persentase gangguan ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang dapat diselesaikan	99	%	90	%	Rp 2.097.414.900	95	%	Rp 845.655.650	100	%	Rp 845.655.650				
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penindakan dalam pelanggaran trantibum	100	%	100	%	Rp 1.997.414.900	100	%	Rp 665.655.650	100	%	Rp 665.655.650				
		5.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan K3 (Ketertiban, ketertaman, dan keindahan)	100	%	100	%	Rp 1.486.477.000	100	%	Rp 511.695.650	100	%	Rp 511.695.650				

		1.05.02 .2.01.0 003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 850.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000				
		1.05.02 .2.01.0 004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	2	Dokumen	Rp 661.420.000	2	Dokumen	Rp 50.500.000	2	Dokumen	Rp 50.500.000				

		1.05.02 .2.01.0 006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2	Dokumen	3	Dokumen	Rp 815.657.000	4	Dokumen	Rp 240.695.650	4	Dokumen	Rp 240.695.650				
		1.05.02 .2.01.0 008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	0	Dokumen	0	Dokumen	Rp -	1	Dokumen	Rp 2.500.000	1	Dokumen	Rp 2.500.000				
		1.05.02 .2.01.0 014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui	20	Orang	20	Orang	Rp 2.050.000	15	Orang	Rp 2.000.000	15	Orang	Rp 2.000.000				

			Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	98	Kasus	16	Kasus	Rp 2.500.000	179	Kasus	Rp 150.000.000	179	Laporan	Rp 150.000.000			
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda	5	Kasus	3	Kasus	Rp 1.500.000	3	Kasus	Rp 1.500.000	3	Laporan	Rp 1.500.000			

			Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan														
		1.05.02 .2.01.0 017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang	1	Laporan	1	Laporan	Rp 2.500.000	1	Laporan	Rp 4.500.000	1	Laporan	Rp 4.500.000			

				Terlayani															
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran perda dan perbup	100	%	100	%	Rp 510.937.900	100	%	Rp 153.960.000	100	%	Rp 153.960.000				
		1.05.02.2.02.010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	31	Laporan	25	Laporan	Rp 509.437.900	18	Laporan	Rp 149.460.000	18	Laporan	Rp 149.460.000				

		1.05.02 .2.02.0 011	Penangan an Atas Pelanggan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penangan an Atas Pelanggan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	57	Lap oran	0	L ap oran	Rp -	4	L ap oran	Rp 2.000. 000	4	L ap oran	Rp 2.000.0 00				
		1.05.02 .2.02.0 012	Pengawa san Atas Kepatuha n Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawa san yang Dilakukan n Terhadap Kepatuha n Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	Lap oran	3	L ap oran	Rp 1.500. 000	3	L ap oran	Rp 2.500. 000	3	L ap oran	Rp 2.500.0 00				
		1.05.03	PROGR AM PENAN GGULA NGAN BENCA	Persenta se pelayana n penangg ulangan	100	%	100	%	Rp 100.0 00.00 0	10 0	%	Rp 180.0 00.00 0	10 0	%	Rp 180.00 0.000				

			NA	bencana															
		1.05.03 .2.02	Pelayan an Pencega han dan Kesiapsi agaan Terhada p Bencana	Persenta se jumlah petugas yang aktif dalam penanga nan darurat bencana	100	%	100	%	Rp 100.0 00.00 0	10 0	%	Rp 180.0 00.00 0	10 0	%	Rp 180.00 0.000				
		1.05.03 .2.02.0 021	Pengemb angan Kapasita s Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penangg ulangan Bencana (TRC PB) Kabupate n/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompete nsi untuk penangan an awal darurat bencana	30	Ora ng	0	O ra n g	Rp -	3 0	O ra n g	Rp 5.000. 000	3 0	O ra n g	Rp 5.000.0 00				

		1.05.03 .2.02.0 028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	Orang	150	Orang	Rp 100.000.000	80	Orang	Rp 175.000.000	80	Orang	Rp 175.000.000				
	Peningkatan penangan dan penyelamatan kebakaran secara respon time			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	68	%	64	%	Rp 300.000.000	67	%	Rp 300.000.000	70	%	Rp 300.000.000				
		01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100	%	100	%	Rp 300.000.000	100	%	Rp 300.000.000	100	%	Rp 300.000.000				

			AN KEBAK ARAN DAN PENYE LAMAT AN NON KEBAK ARAN																
		1.05.04 .2.01	Pencega han, Pengend alian, Pemada man, Penyela matan, dan Penanga nan Bahan Berbaha ya dan Beracun Kebakar an dalam Daerah Kabupat en/Kota	Persenta se Waktu tanggap(respon time) penanga nan kebakar an	91,6 7	%	90	%	Rp 139.3 02.00 0	88 ,3	%	Rp 144.7 20.00 0	86 ,6 7	%	Rp 144.72 0.000				
		1.05.04 .2.01.0 001	Pencegah an Kebakara n dalam Daerah Kabupate n/Kota	Jumlah Dokume n NSPM Pencegah an/Penan ggulanga n Kebakara n dalam Daerah Kabupate n/Kota	14	Dok ume n	10	D o k u m en	Rp 70.26 3.232	1 0	D o k u m en	Rp 71.03 1.232	1 0	D o k u m en	Rp 71.031. 232				

				Setiap Tahunnya															
		1.05.04 .2.01.002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	34	Laporan	20	Laporan	Rp 45.200.000	35	Laporan	Rp 33.700.000	35	Laporan	Rp 33.700.000				
		1.05.04 .2.01.003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	20	Dokumen	20	Dokumen	Rp 14.300.000	30	Dokumen	Rp 22.150.000	30	Dokumen	Rp 22.150.000				

				Kebakara n															
		1.05.04 .2.01.0 007	Pembina an Aparatur Pemada m Kebakara n	Jumlah Aparatur Pemada m Kebakara n yang Memiliki Sertifikas i Keteram pilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegah an dan Penangg ulangan Kebakara n	39	Ora ng	30	O ra n g	Rp 3.018. 000	4 5	O ra n g	Rp 11.26 8.000	4 5	O ra n g	Rp 11.268. 000				
		1.05.04 .2.01.0 017	Pengadaa n Sarana dan Prasaran a Pencegah an, Penangg ulangan Kebakara n dan	Jumlah Sarana dan Prasaran a Untuk Pencegah an dan Penangg ulangan Kebakara	11	Uni t	8	U ni t	Rp 6.520. 768	1 0	U ni t	Rp 6.570. 768	1 0	U ni t	Rp 6.570.7 68				

			Alat Pelindung Diri	n dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait															
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	100	%	Rp 1.990.000	100	%	Rp 2.090.000	100	%	Rp 2.090.000				
		1.05.04.2.02.001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	2	Dokumen	Rp 1.310.000	2	Dokumen	Rp 1.360.000	2	Dokumen	Rp 1.360.000				

		1.05.04 .2.02.0 002	Penilaian Sarana Prasaran a Proteksi Kebakara n	Jumlah Dokume n yang Memuat Data Banguna n/Gedun g/Lingku ngan yang Memenu hi Kelaikan Standar Sarana Prasaran a Proteksi Kebakara n	0	Dok ume n	1	D o k u m e n	Rp 680.0 00	2	D o k u m e n	Rp 730.0 00	2	D o k u m e n	Rp 730.00 0				
		1.05.04 .2.04	Pember dayaan Masyara kat dalam Pencega han Kebakar an	Persenta se masyara kat yang mendap atkan edukasi pencega han dan penangg ulangan kebakar an	100	%	100	%	Rp 150.0 00.00 0	10 0	%	Rp 150.0 00.00 0	10 0	%	Rp 150.00 0.000				
		1.05.04 .2.04.0 001	Pemberd ayaan Masyara kat dalam Pencegah an dan Penangg ulangan Kebakara	Jumlah Warga Masyara kat yang Mendapa tkan Sosialisa si Edukasi	150	Ora ng	150	O ra n g	Rp 150.0 00.00 0	2 0 0	O ra n g	Rp 150.0 00.00 0	2 0 0	O ra n g	Rp 150.00 0.000				

			n melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya															
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	100	%	Rp 8.708.000	100	%	Rp 3.190.000	100	%	Rp 3.190.000				
		1.05.04.2.05.005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan	0	Unit	8	Unit	Rp 8.708.000	3	Unit	Rp 3.190.000	3	Unit	Rp 3.190.000				

				Standar Teknis														
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Nilai SAKIP PD	60,39	nilai	60,85	nilai	Rp 13.293.550.017	61,25	nilai	Rp 12.480.195.783	61,85	nilai	Rp 12.480.195.783			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,14	Indeks	85,25	Indeks		86,00	Indeks		87,00	Indeks				
		1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupat	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerin	100	Indeks	100	Indeks	Rp 13.293.550.017	100	Indeks	Rp 12.480.195.783	100	Indeks	Rp 12.480.195.783			

			en / Kota	tahan daerah															
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusun nya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun sesuai dengan aturan	100	%	100	%	Rp 10.026.900	100	%	Rp 13.899.950	100	%	Rp 13.899.950				
		5.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	Rp 3.191.550	3	Dokumen	Rp 3.967.350	3	Dokumen	Rp 3.967.350				
		5.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 121.550	1	Dokumen	Rp 2.603.050	1	Dokumen	Rp 2.603.050				

				Dokumen RKA-SKPD															
		5.01.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 116.050	1	Dokumen	Rp 1.834.300	1	Dokumen	Rp 1.834.300				
		5.01.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 517.500	1	Dokumen	Rp 675.250	1	Dokumen	Rp 675.250				

		5.01.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 477.000	1	Dokumen	Rp 675.250	Dokumen	Rp 675.250					
		5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Rp 3.803.250	1	Laporan	Rp 2.344.750	1	Laporan	Rp 2.344.750				

		5.01.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	6	Lap ora n	6	L ap or an	Rp 1.800. 000	6	L ap or an	Rp 1.800. 000	6	L ap or an	Rp 1.800.0 00				
		5.01.01 .2.02	Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah	Persenta se Dokume n Adminis trasi Keuanga n tepat waktu	100	%	100	%	Rp 7.806. 428.9 59	10 0	%	Rp 8.578. 171.7 83	10 0	%	Rp 8.578.1 71.783				
		5.01.01 .2.02.0 001	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN	76	Ora ng/ bula n	100	O ra n g/ b ul an	Rp 7.803. 238.8 09	1 0 0	O ra n g/ b ul an	Rp 8.572. 321.7 83	1 0 0	O ra n g/ b ul an	Rp 8.572.3 21.783				
		5.01.01 .2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	1	Lap ora n	1	L ap or an	Rp 690.0 50	1	L ap or an	Rp 2.000. 000	1	L ap or an	Rp 2.000.0 00				

		5.01.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	Rp 2.500.100	18	Laporan	Rp 3.850.000	18	Laporan	Rp 3.850.000				
		5.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	%	100	%	Rp 1.430.100	100	%	Rp 3.300.000	100	%	Rp 3.300.000				
		5.01.01 .2.03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 615.050	1	Dokumen	Rp 865.000	1	Dokumen	Rp 865.000				

			Daerah SKPD															
		5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	7	Laporan	Rp 815.050	7	Laporan	Rp 2.435.000	7	Laporan	Rp 2.435.000			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	100	%	Rp 93.355.000	100	%	Rp 75.000.000	100	%	Rp 75.000.000			
		5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	340	Paket	Rp 93.355.000	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -			
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengiku	0	orang	0	orang	Rp -	3	orang	Rp 75.000.000	9	orang	Rp 75.000.000			

				ti Pendidik an dan Pelatihan															
		5.01.01 .2.06	Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	Persenta se Kebutuh an Kantor yang terfasilit asi	100	%	100	%	Rp 32.65 4.608	10 0	%	Rp 59.51 2.250	10 0	%	Rp 59.512. 250				
		5.01.01 .2.06.0 001	Penyedia an Kompon en Instalasi Listrik/ Penerang an Banguna n Kantor	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediak an	4	Pak et	4	P ak et	Rp 797.0 00	4	P ak et	Rp 1.000. 000	4	P ak et	Rp 1.000.0 00				
		5.01.01 .2.06.0 002	Penyedia an Peralatan dan Perlengk apan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an	12	Pak et	12	P ak et	Rp 13.70 5.450	1 2	P ak et	Rp 16.79 5.900	1 2	P ak et	Rp 16.795. 900				
		5.01.01 .2.06.0 003	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	0	Pak et	0	P ak et	Rp -	1	P ak et	Rp 850.0 00	1	P ak et	Rp 850.00 0				

				Disediak an															
		5.01.01 .2.06.0 004	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediak an	8	Pak et	8	P ak et	Rp 5.250. 000	8	P ak et	Rp 9.000. 000	8	P ak et	Rp 9.000.0 00				
		5.01.01 .2.06.0 005	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengan daan yang Disediak an	12	Pak et	12	P ak et	Rp 2.462. 158	1 2	P ak et	Rp 3.366. 350	1 2	P ak et	Rp 3.366.3 50	-	-	-	-
		5.01.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjung an Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjung an Tamu	6	Lap ora n	12	L ap or an	Rp 2.760. 000	1 2	L ap or an	Rp 3.500. 000	1 2	L ap or an	Rp 3.500.0 00				
		5.01.01 .2.06.0 009	Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	40	Lap ora n	6	L ap or an	Rp 7.680. 000	4 0	L ap or an	Rp 25.00 0.000	4 0	L ap or an	Rp 25.000. 000				

		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	Rp 5.196.235.800	100	%	Rp 3.582.080.000	100	%	Rp 3.582.080.000				
		5.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4	Laporan	Rp 905.800	4	Laporan	Rp 1.000.000	4	Laporan	Rp 1.000.000				
		5.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	Rp 54.000.000	12	Laporan	Rp 54.000.000	12	Laporan	Rp 54.000.000				
		5.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	Rp 5.141.330.000	12	Laporan	Rp 3.527.080.000	12	Laporan	Rp 3.527.080.000				

		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	Rp 153.418.650	100	%	Rp 168.231.800	100	%	Rp 168.231.800				
		5.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	1	Unit	Rp 22.604.400	1	Unit	Rp 26.371.800	1	Unit	Rp 26.371.800				
		5.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	19	Unit	Rp 125.144.250	19	Unit	Rp 135.160.000	19	Unit	Rp 135.160.000				

		5.10.01 .2.09.0 006	Pemeliha raan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihar a	12	Uni t	6	U ni t	Rp 4.470. 000	6	U ni t	Rp 5.500. 000	6	U ni t	Rp 5.500.0 00				
		5.01.01 .2.09.0 007	Pemeliha raan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihar a	15	Uni t	15	U ni t	Rp 1.200. 000	1 5	U ni t	Rp 1.200. 000	1 5	U ni t	Rp 1.200.0 00				
TOTAL									Rp 15.69 0.964. 917			Rp 13.62 5.851. 433			Rp 13.625. 851.43 3				
Sebelum di Mutakhirkan																			
Meningka tkan ketentram an, ketertiban umum dan perlindun gan masyarak at				Persent ase penurun an pelangg aran terhada p Trantib um dan Perda/p erkada	4,3 5	%	7,9 5	%	Rp 15.690 .964.9 17	8, 02	%	Rp1 3.62 5.85 1.43 3	8, 72	%	Rp13. 625.85 1.433			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BANGK ALAN
	Penguat an penegak an perda trantibn as dengan melaku kan			Persent ase ganggua n ketentra man, ketertib an dan perlindu ngan	99	%	90	%	Rp 2.097. 414.90 0	95	%	Rp 845. 655. 650	10 0	%	Rp 845.65 5.650				

	edukasi dan pengen dalian masyar akat			masyara kat yang dapat diselesai kan																
		1.05.02	PROGR AM PENIN GKATA N KETEN TERAM AN DAN KETER TIBAN UMUM	Persent ase peninda kan dalam pelangg aran trantibu m	10 0	%	100	%	Rp 1.997.4 14.900	10 0	%	Rp 665.6 55.65 0	10 0	%	Rp 665.65 5.650					
		5.01.02.2. 01	Penanga nan Ganggu an Ketenter aman dan Ketertib an Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupat en/Kota	Persent ase penanga nan pengadu an K3 (Keterti ban, ketentra man, dan keindah an)	10 0	%	100	%	Rp 1.486.4 77.000	10 0	%	Rp 511.6 95.65 0	10 0	%	Rp 511.69 5.650					

		1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Pencegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Pencegah Dini, Pelaksanaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	98	Kasus	16	Kasus	Rp 2.500.000	179	Kasus	Rp 150.000.000	179	Kasus	Rp 150.000.000				
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	5	Kasus	3	Kasus	Rp 1.500.000	3	Kasus	Rp 1.500.000	3	Kasus	Rp 1.500.000				

			Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan															
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 850.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000	3	Dokumen	Rp 60.000.000				
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan	1	Dokumen	2	Dokumen	Rp 661.420.000	2	Dokumen	Rp 50.500.000	2	Dokumen	Rp 50.500.000				

			Ketentra man dan Ketertiba n Umum	Perlindu ngan Masyara kat dalam rangka Ketenter aman dan Ketertib an Umum															
		1.05.02.2. 01.05	Peningka tan Kapasita s SDM Satuan Polisi Satuan Pamongp raja dan Satuan Perlindu ngan Masyara kat termasuk dalam Pelaksan aan Tugas yang Bernuans a Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindu ngan Masyara kat yang Ditingka tkan Kapasita sanya	20	Ora ng	20	Or an g	Rp 2.050.0 00	1 5	O ra n g	Rp 2.000 .000	1 5	O ra n g	Rp 2.000.0 00				
		1.05.02.2. 01.07	Kerjasa ma antar Lembaga dan Kemitraa n dalam Teknik Pencega han dan	Jumlah Dokume n Hasil Pelaksan aan Kerja Sama antar Lembag	2	Do ku me n	3	D ok u m en	Rp 815.65 7.000	4	D o k u m en	Rp 240.6 95.65 0	4	D o k u m en	Rp 240.69 5.650				

			Penangan nan Gangguan Ketentra man dan Ketertiba n Umum	a dan Kemitra an dalam Teknik Pencega han Kejahata n															
		1.05.02.2. 01.09	Penyusu nan SOP Ketertiba n Umum dan Ketenter aman Masyara kat	Jumlah Dokume n SOP Ketertib an Umum dan Ketenter aman Masyara kat yang Telah Dibuat dan Dimutak hirkan	0	Do ku me n	0	D ok u m en	Rp -	1	D o k u m en	Rp 2.500 .000	1	D o k u m en	Rp 2.500.0 00				
		1.05.02.2. 01.10	Penyedia an Layanan dalam rangka Dampak Penegak an Peratura n Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyedia an Layanan Dampak Penegak an Perda dan Perkada yang Terlayan i	1	Lap ora n	1	La po ra n	Rp 2.500.0 00	1	L ap or an	Rp 4.500 .000	1	L ap or an	Rp 4.500.0 00				
		1.05.02.2. 02	Penegak an Peratur an Daerah Kabupat	Persent ase penanga nan pelangg aran	10 0	%	100	%	Rp 510.93 7.900	10 0	%	Rp 153.9 60.00 0	10 0	%	Rp 153.96 0.000				

			en/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	perda dan perbup															
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	31	Laporan	25	Laporan	Rp 509.437.900	18	Laporan	Rp 149.460.000	18	Laporan	Rp 149.460.000				
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	0	Laporan	3	Laporan	Rp 1.500.000	3	Laporan	Rp 2.500.000	3	Laporan	Rp 2.500.000				

				n Daerah dan Peratura n Bupati/ Wali Kota															
		1.05.02.2. 02.03	Penanga nan atas Pelangga ran Peratura n Daerah dan Peratura n Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksan aan Penanga nan Atas Pelangga ran Peratura n Daerah dan Peratura n Gubernu r yang Dapat Ditangan i Sesuai SOP	57	Lap ora n	0	La po ra n	Rp -	4	L ap or an	Rp 2.000 .000	4	L ap or an	Rp 2.000.0 00				
		1.05.02.2. 03	Pembina an Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupat en/Kota	Persent ase aparatu r yang ikut pelatiha n	10 0	%	100	%	Rp -	10 0	%	Rp -	10 0	%	Rp -				

		1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -	0	Laporan	Rp -				
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penanggulangan bencana	100	%	100	%	Rp 100.000.000	100	%	Rp 180.000.000	100	%	Rp 180.000.000				
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanga	100	%	100	%	Rp 100.000.000	100	%	Rp 180.000.000	100	%	Rp 180.000.000				

			Bencana	nan darurat bencana														
		1.05.03.2. 02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	Orang	150	Orang	Rp 100.000.000	80	Orang	Rp 175.000.000	80	Orang	Rp 175.000.000			
		1.05.03.2. 02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30	Orang	0	Orang	Rp -	30	Orang	Rp 5.000.000	30	Orang	Rp 5.000.000			
		1.05.03.2. 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	%	100	%	Rp -	100	%	Rp -	100	%	Rp -			

		1.05.03.2. 03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupat en/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong , dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	Orang	0	Orang	Rp -	0	Orang	Rp -	0	Orang	Rp -				
	Peningkatan penanganan dan penyelamatan kebakaran secara respon time			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara respon time	68	%	64	%	Rp 300.00 0.000	67	%	Rp 300.00 0.000	70	%	Rp 300.00 0.000				
		01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	100	%	100	%	Rp 300.00 0.000	100	%	Rp 300.00 0.000	100	%	Rp 300.00 0.000				

			NON KEBAK ARAN																
		1.05.04.2. 01	Pencega han, Pengend alian, Pemada man, Penyela matan, dan Penanga nan Bahan Berbaha ya dan Beracun Kebakar an dalam Daerah Kabupat en/Kota	Persent ase Waktu tanggap (respon time) penanga nan kebakar an	91, 67	%	90	%	Rp 139.30 2.000	88 ,3	%	Rp 144.7 20.00 0	86 ,6 7	%	Rp 144.72 0.000				
		1.05.04.2. 01.01	Pencega han Kebakar an dalam Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Dokume n NSPM Pencega han/Pena nggulan gan Kebakar an dalam Daerah Kabupat en/Kota Setiap Tahunny	14	Do ku me n	10	D ok u m en	Rp 70.263. 232	1 0	D o k u m en	Rp 71.03 1.232	1 0	D o k u m en	Rp 71.031. 232				

				a														
		1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	34	Laporan	20	Laporan	Rp 45.200.000	35	Laporan	Rp 33.700.000	35	Laporan	Rp 33.700.000			
		1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan	20	Dokumen	20	Dokumen	Rp 14.300.000	30	Dokumen	Rp 22.150.000	30	Dokumen	Rp 22.150.000			

				Non Kebakar an															
		1.05.04.2. 01.06	Pengada an Sarana dan Prasaran a Pencega han, Penangg ulangan Kebakar an dan Alat Pelindun g Diri	Jumlah Sarana dan Prasaran a Untuk Pencega han dan Penangg ulangan Kebakar an dan Alat Pelindun g Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	11	Uni t	8	U nit	Rp 6.520.7 68	1 0	U ni t	Rp 6.570 .768	1 0	U ni t	Rp 6.570.7 68				
		1.05.04.2. 01.07	Pembina an Aparatur Pemada m Kebakar an	Jumlah Aparatur Pemada m Kebakar an yang Memilik i Sertifika si Keteram	39	Ora ng	30	Or an g	Rp 3.018.0 00	4 5	O ra n g	Rp 11.26 8.000	4 5	O ra n g	Rp 11.268. 000				

				pilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran															
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	100	%	Rp 1.990.000	100	%	Rp 2.090.000	100	%	Rp 2.090.000				
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2	Dokumen	2	Dokumen	Rp 1.310.000	2	Dokumen	Rp 1.360.000	2	Dokumen	Rp 1.360.000				

		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 680.000	2	Dokumen	Rp 730.000	2	Dokumen	Rp 730.000				
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat yang mendapatkan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	%	100	%	Rp 150.000.000	100	%	Rp 150.000.000	100	%	Rp 150.000.000				
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi	150	Orang	150	Orang	Rp 150.000.000	200	Orang	Rp 150.000.000	200	Orang	Rp 150.000.000				

			an melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya															
		1.05.04.2.05	Penyele nggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap p Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan yang diadakan	100	%	100	%	Rp 8.708.000	100	%	Rp 3.190.000	100	%	Rp 3.190.000				
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia /Penyelamatan dan Evakuasi	0	Unit	8	Unit	Rp 8.708.000	3	Unit	Rp 3.190.000	3	Unit	Rp 3.190.000				

				Sesuai dengan Standar Teknis														
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Nilai SAKIP PD	60,39	nilai	60,85	nilai	Rp 13.293.550.017	61,25	nilai	Rp 12.480.195.783	61,85	nilai	Rp 12.480.195.783			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	85,14	Indeks	85,25	Indeks		86	Indeks		87	Indeks				
		1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerin	100	Indeks	100	Indeks	Rp 13.293.550.017	100	Indeks	Rp 12.480.195.783	100	Indeks	Rp 12.480.195.783			

			Kabupat en / Kota	tahan daerah															
		5.01.01.2. 01	Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	Persent ase Tersusu nnya Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah tersusun sesuai dengan aturan	10 0	%	100	%	Rp 10.026. 900	10 0	%	Rp 13.89 9.950	10 0	%	Rp 13.899. 950				
		5.01.01.2. 01.01	Penyusu nan Dokume n Perencan aan Perangk at Daerah	Jumlah Dokume n Perencan aan Perangk at Daerah	3	Do ku me n	3	D ok u m en	Rp 3.191.5 50	3	D o k u m en	Rp 3.967 .350	3	D o k u m en	Rp 3.967.3 50				
		5.01.01.2. 01.02	Koordina si dan Penyusu nan Dokume n RKA- SKPD	Jumlah Dokume n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Kordin asi Penyusu nan Dokume n RKA-	1	Do ku me n	1	D ok u m en	Rp 121.55 0	1	D o k u m en	Rp 2.603 .050	1	D o k u m en	Rp 2.603.0 50				

				SKPD															
		5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Rp 116.050	1	Dokumen	Rp 1.834.300	1	Dokumen	Rp 1.834.300				
		5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 517.500	1	Dokumen	Rp 675.250	1	Dokumen	Rp 675.250				

		5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 477.000	1	Dokumen	Rp 675.250	Dokumen	Rp 675.250				
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Rp 3.803.250	1	Laporan	Rp 2.344.750	1	Laporan	Rp 2.344.750			

		5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	Rp 1.800.000	6	Laporan	Rp 1.800.000	6	Laporan	Rp 1.800.000				
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	100	%	100	%	Rp 7.806.428.959	100	%	Rp 8.578.171.783	100	%	Rp 8.578.171.783				
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	Orang/bulan	100	Orang/bulan	Rp 7.803.238.809	100	Orang/bulan	Rp 8.572.321.783	100	Orang/bulan	Rp 8.572.321.783				
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Rp 690.050	1	Laporan	Rp 2.000.000	1	Laporan	Rp 2.000.000				

		5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semester an SKPD	18	Laporan	18	Laporan	Rp 2.500.100	18	Laporan	Rp 3.850.000	18	Laporan	Rp 3.850.000				
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terinventarisir	100	%	100	%	Rp 1.430.100	100	%	Rp 3.300.000	100	%	Rp 3.300.000				
		5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen	1	Dokumen	Rp 615.050	1	Dokumen	Rp 865.000	1	Dokumen	Rp 865.000				

			Daerah SKPD																
		5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	Laporan	7	Laporan	Rp 815.050	7	Laporan	Rp 2.435.000	7	Laporan	Rp 2.435.000				
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %		100 %		Rp 93.355.000	100 %		Rp 75.000.000	100 %		Rp 75.000.000				
		5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	340	Paket	Rp 93.355.000	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp -				
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0	orang	0	Orang	Rp -	3	Orang	Rp 75.000.000	9	Orang	Rp 75.000.000				

				Pendidikan dan Pelatihan															
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Kantor yang terfasilitasi	100	%	100	%	Rp 32.654.608	100	%	Rp 59.512.250	100	%	Rp 59.512.250				
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	Rp 797.000	4	Paket	Rp 1.000.000	4	Paket	Rp 1.000.000				
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	Rp 13.705.450	12	Paket	Rp 16.795.900	12	Paket	Rp 16.795.900				
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	0	Paket	0	Paket	Rp -	0	Paket	Rp 850.000	0	Paket	Rp 850.000				

				yang Disedi- ak-an															
		5.01.01.2. 06.04	Penyedia- an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedi- ak-an	8	Pak- et	8	Pa- ke- t	Rp 5.250.0 00	8	Pak- et	Rp 9.000 .000	8	Pak- et	Rp 9.000.0 00				
		5.01.01.2. 06.05	Penyedia- an Barang Cetakan dan Penggaa- n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggaa- n yang Disedi- ak-an	12	Pak- et	12	Pa- ke- t	Rp 2.462.1 58	12	Pak- et	Rp 3.366 .350	12	Pak- et	Rp 3.366.3 50	-	-	-	-
		5.01.01.2. 06.08	Fasilitas- i Kunjung- an Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas- i Kunjung- an Tamu	6	Lap- oran	12	La- po- ran	Rp 2.760.0 00	12	Lap- oran	Rp 3.500 .000	12	Lap- oran	Rp 3.500.0 00				
		5.01.01.2. 06.09	Penyelen- ggaraan Rapat Koordin- asi dan Konsulta- si SKPD	Jumlah Laporan Penyelen- ggaraan Rapat Koordin- asi dan Konsulta- si SKPD	40	Lap- oran	6	La- po- ran	Rp 7.680.0 00	40	Lap- oran	Rp 25.00 0.000	40	Lap- oran	Rp 25.000. 000				
		5.01.01.2. 07	Pengada- an Barang Milik Daerah Penunja- ng	Persent- ase Pengada- an Barang Milik Daerah	100	%	100	%	Rp -	100	%	Rp -	100	%	Rp -				

			Urusan Pemerintah	sesuai RKBM D															
		1.05.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -				
		1.05.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -				
		1.05.01.2. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -	0	Unit	Rp -				
		5.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	Rp 5.196.235.800	100	%	Rp 3.582.080.000	100	%	Rp 3.582.080.000				
		5.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4	Laporan	4	Laporan	Rp 905.800	4	Laporan	Rp 1.000.000	4	Laporan	Rp 1.000.000				

				Surat Menyurat															
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	Rp 54.000.000	12	Laporan	Rp 54.000.000	12	Laporan	Rp 54.000.000				
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	Rp 5.141.330.000	12	Laporan	Rp 3.527.080.000	12	Laporan	Rp 3.527.080.000				
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	%	100	%	Rp 153.418.650	100	%	Rp 168.231.800	100	%	Rp 168.231.800				

		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Dinas Jabatan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	1	Unit	Rp 22.604.400	1	Unit	Rp 26.371.800	1	Unit	Rp 26.371.800				
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	Unit	19	Unit	Rp 125.144.250	19	Unit	Rp 135.160.000	19	Unit	Rp 135.160.000				
		5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15	Unit	Rp 1.200.000	15	Unit	Rp 1.200.000	15	Unit	Rp 1.200.000				
		5.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jumlah peralatan dan mesin	12	Unit	6	Unit	Rp 4.470.000	6	Unit	Rp 5.500.000	6	Unit	Rp 5.500.000				

			Mesin Lainnya	lainnya yang dipelihar a														
		5.01.01.2. 09.09	Pemeliha raan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya yang dipelihar a/ direhabil itasi	1	Un it	0	U ni t	Rp -	0	U ni t	Rp -	0	U ni t	Rp -			
TOTAL									Rp 15.690. 964.91 7			Rp 13.62 5.851 .433			Rp 13.625. 851.43 3			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas).

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga negara.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan 2024-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan.

Adapun pemetaan target dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda/perkada	4,35%	7,95%	8,02%	8,72%	9,56%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		(Tahun 2023)	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	90%	95%	100%	

	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	176 pelanggaran dan pengaduan	162 pelanggaran dan pengaduan	149 pelanggaran dan pengaduan	136 pelanggaran dan pengaduan	
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	60 Satlinmas	60 Satlinmas	60 Satlinmas	60 Satlinmas	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7 perda	7 perda	7 perda	7 perda	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	1 polisi pamong praja	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	71%	71%	71%	71%	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	39 layanan penyelamatan dan evakuasi	40 layanan penyelamatan dan evakuasi	43 layanan penyelamatan dan evakuasi	45 layanan penyelamatan dan evakuasi	
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	0	0	0	

	3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	0	0	0	
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	0	0	
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	230 sarana prasarana	235 sarana prasarana	240 sarana prasarana	245 sarana prasarana	
	6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 aparaturnya	2 aparaturnya	2 aparaturnya	2 aparaturnya	
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	11 relawan	20 relawan	25 relawan	30 relawan	
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	91,67%	90%	88,3%	86,67%	

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses perumusan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024- 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan. serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang berpengaruh terhadap upaya - upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan indikatif kurun waktu tiga tahun (2024-2026). Sasaran, program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Perubahan Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan melakukan pengendalian dan evaluasi rencana strategis untuk mengukur, mengendalikan pelaksanaan kerja dan mengukur keberhasilan pencapaian yang telah ditargetkan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan dapat mewujudkan tujuan, sasaran, indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan sehingga dapat mewujudkan ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator dari RPD Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Bangkalan, 16 Desember 2024

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANGKALAN



ANANG YULIANTO HARI PURNOMO, AP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19760714 199412 1 001